

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik terutama

pelayanan terhadap masyarakat,

Pemerintah Daerah dirasa perlu memberikan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil secara gratis;

- b. bahwa untuk pemberian pelayanan Kartu
 Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 secara gratis dimaksud bertentangan
 dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi
 Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
 Penduduk dan Akta Catatan Sipil sehingga
 perlu dicabut;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah

- Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 2. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Republik Indonesia 6. 32 Tahun Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor Lembaran Negara 125. Tambahan 4437) Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan 2004 Daerah tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 11. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah. Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor16 Tahun 2006 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 24 Oktober 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO, Dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 24 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Muda, NIP 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 NOMOR 11